

# DULOHUPA:

## Jejak Gorontalo Membangun Pembangunan Inklusif

Pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur semata, melainkan bagaimana setiap warga negara merasakan manfaatnya secara adil dan merata. Namun, kenyataannya kelompok rentan—seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marjinal lainnya—sering kali belum memperoleh akses setara terhadap layanan dasar.

Dalam forum-forum perencanaan resmi, kehadiran mereka kerap bersifat formalitas. Pendapat dan usulan jarang benar-benar dicatat atau masuk ke dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan: sebagian masyarakat merasakan manfaat pembangunan, sementara sebagian lain tertinggal. Situasi semacam ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Menyadari kesenjangan tersebut, pemerintah nasional sejak lama berupaya memprioritaskan inklusi kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi kelompok rentan tidak boleh terbatas kehadiran saja, melainkan harus diwujudkan dalam partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Kehadiran semata tanpa pengaruh dianalogikan seperti penonton di pinggir lapangan: bisa melihat pertandingan, tetapi tidak bisa terlibat dan mempengaruhi terhadap hasil skor. Partisipasi bermakna berarti bukan hanya diberi kursi di meja perundingan, melainkan juga aksesibilitas, mikrofon yang menyala, serta memastikan bahwa suara mereka ikut membentuk keputusan akhir.

Komitmen inklusivitas tercermin dalam sejumlah regulasi. Pemerintah telah mengeluarkan:



- UU No. 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya perencanaan partisipatif.
- UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah yang memberi ruang bagi daerah untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan warganya, termasuk memastikan partisipasi kelompok rentan.
- UU No. 08 Tahun 2016** tentang Penyandang Disabilitas serta **PP No. 70 Tahun 2019** tentang penghormatan hak penyandang disabilitas, yang menegaskan kewajiban pemerintah menyediakan ruang inklusif dalam kebijakan dan pelayanan.

Di tingkat global, Indonesia juga berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan prinsip *No One Left Behind*. Artinya, pembangunan harus benar-benar menjangkau semua warga tanpa terkecuali.

## **Komitmen Gorontalo: Dari Kebijakan ke Aksi Nyata**

Provinsi Gorontalo memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan semangat inklusi dalam perencanaan pembangunan. Kapasitas fiskal yang terbatas serta kondisi sosial-ekonomi yang ditandai kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan keterbatasan akses layanan dasar menuntut solusi berbasis data dan partisipasi luas, agar tercipta keadilan fiskal dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah provinsi menyadari adanya masalah serius dalam pendataan dan ketepatan sasaran program pembangunan. Tidak jarang bantuan pemerintah diterima oleh pihak yang tidak berhak, sementara kelompok yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Hal ini membuktikan bahwa tanpa mendengar suara kelompok rentan, pembangunan berisiko hanya menjawab kebutuhan sebagian masyarakat.



Dari kebutuhan itulah lahir gagasan Pemerintah Provinsi, dengan dukungan Program SKALA, untuk membentuk forum khusus yang memberi ruang afirmatif bagi kelompok rentan sebelum Musrenbang reguler dilaksanakan. Forum ini diberi nama Forum Gorontalo Inklusi Dulohupa (FGI Dulohupa), mengambil nilai lokal Dulohupa yang bermakna musyawarah untuk mufakat—cerminan semangat kebersamaan masyarakat Gorontalo.

## Forum Gorontalo Inklusi Dulohupa: Dari Ide ke Ruang Diskusi Inklusif

FGI Dulohupa dilaksanakan sebagai forum pra-Musrenbang, tempat kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, organisasi masyarakat sipil, dan perangkat daerah duduk bersama dalam suasana setara untuk merumuskan kebutuhan kelompok rentan.

Berbeda dengan forum formal yang sering terasa kaku, FGI Dulohupa dirancang dengan metode partisipatif. Fasilitator mendorong semua pihak berbicara menggunakan bahasa sederhana, media visual, hingga simulasi, sehingga hambatan komunikasi dapat diatasi.

Aspirasi yang muncul sangat konkret, antara lain:



Layanan kesehatan ramah disabilitas di puskesmas.



Transportasi publik yang aman bagi perempuan dan anak.



Program kesehatan keliling untuk lansia



Ruang aman dan sekolah bebas kekerasan bagi anak



Dukungan asrama bagi pelajar dari desa terpencil

Seluruh usulan dituangkan dalam berita acara resmi dan dibawa ke Musrenbang RKPD Provinsi. Seperti disampaikan Andre Wartabone, penyandang disabilitas netra:

**Selama ini kami sering diundang hadir, tapi tidak pernah tahu apakah usulan kami diterima. Baru kali ini kami merasa didengar, karena di FGI Dulohupa usulan kami ditulis dalam berita acara dan masuk ke dokumen resmi.”**

Untuk menjamin keberlanjutan, Pemprov Gorontalo menyusun Panduan Pelaksanaan FGI Dulohupa yang berisi prinsip-prinsip dasar: partisipatif, nondiskriminatif, transparan, inklusif, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Forum ini diposisikan bukan sebagai agenda tambahan, melainkan bagian integral dari siklus perencanaan daerah.

Selain itu, Pemprov juga berencana merevisi Pergub No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah agar FGI Dulohupa memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat dan tetap dilaksanakan, siapa pun pemimpinnya.

***“Pembangunan harus menyatukan, bukan memisahkan. Forum Dulohupa adalah wujud komitmen kita bahwa setiap suara memiliki arti.”***

Wakil Gubernur Gorontalo

## **Dulohupa: Tradisi yang Menginspirasi Masa Depan**

Forum ini telah memberikan dampak nyata. Forum Anak menyuarakan perlunya sekolah yang ramah anak. Forum Perempuan menekankan pentingnya asrama bagi pelajar perempuan dari daerah terpencil. Sementara itu, penyandang disabilitas mendorong peningkatan aksesibilitas di kantor pelayanan publik.

***“Kami ingin sekolah yang aman, tanpa kekerasan. Lewat forum ini, kami berani bicara karena ada yang mendengarkan”***

Rivaldi Tangahu, peserta Forum Anak

Langkah Pemprov Gorontalo semakin kuat dengan ditetapkannya SK Gubernur No. 225/28/VIII/2025 tentang Tim Pelaksana FGI Dulohupa 2025–2029. Panduan pelaksanaan juga akan diperkuat melalui SK Kepala Bappeda, sehingga dapat dialokasikan anggarannya dalam APBD 2026. Sejumlah pemerintah kabupaten/kota bahkan menyatakan ketertarikan untuk mereplikasi model FGI Dulohupa.

***Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, DR. Wahyudin A. Katili, S.Stp, M.T yang menyatakan, “Kami harapkan para OPD dapat menampung poin-poin yang digagas dalam forum ini, sehingga nanti bisa diakomodasi langsung pada anggaran tahun 2026”. Pernyataan ini menunjukkan komitmen yang serius dari pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti usulan-usulan dalam musyawarah ini.***

FGI Dulohupa membuktikan bahwa nilai budaya lokal dapat menjadi inspirasi tata kelola modern. *Dulohupa* kini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga fondasi kebijakan publik. Dengan panduan dan regulasi yang diperkuat, Gorontalo menunjukkan bahwa pembangunan inklusif dapat direncanakan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Jejak Dulohupa menjadi bukti bahwa pembangunan terbaik adalah pembangunan yang mendengarkan semua suara. Di Gorontalo, suara itu kini semakin nyaring—dan semakin didengar.



**SKALA**  
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

### KONTAK KAMI



IFC Tower 2, Level 17  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23  
Jakarta 12920



[info@skala.or.id](mailto:info@skala.or.id)



<https://s.id/Channel-SKALA>



[SKALA.or.id](https://s.id/Channel-SKALA)